



Jangan Terulang Lagi

● Viral Kuitansi Parkir Rp350 Ribu

YOGYA, TRIBUN
 Pemda DIY angkat bicara terkait viralnya kuitansi tarif parkir Rp350 ribu di kawasan wisata Malioboro. Sekda DIY Kadamanta Baskara Aji menilai, kejadian itu terindikasi kuat sebagai suatu pelanggaran sehingga perlu dilakukan penindakan. Menurutnya, dua belah pihak yakni pengelola parkir dan kru bus sama-sama melakukan kesalahan.

Tempat parkir itu menurut Sekda DIY, Kadamanta Baskara Aji tak berizin sehingga pengelola tempat parkir melakukan pelanggaran. Sedangkan pihak kru bus juga melakukan kesalahan karena memilih parkir di tempat yang tak resmi.

"Semuanya salah. Jalan Margo Utomo (dulu Jalan Mangkubumi) kan tidak boleh untuk parkir bus. Kalau di situ ada tukang parkir memarkirkan bus di situ, salah. Pengemudi

● ke halaman 11

Jangan Terulang Lagi

● Sambungan Hal 1

kan tahu di mana harus parkir," beberrnya.

Pemda DIY telah menyediakan tiga tempat parkir khusus bus pariwisata. Yaitu Area Parkir Senopati Malioboro, Taman Parkir Ngabean, dan Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali. Ketiga tempat parkir resmi tersebut mematok tarif sesuai dengan ketentuan pemerintah.

"Tapi kalau kemudian ada bus parkir di tempat yang tidak seharusnya ya bus juga salah. Mesti tidak boleh parkir di sana," jelasnya.

Selain itu, kepada pemilik lahan kosong yang ingin dijadikan tempat parkir, wajib mengajukan izin terlebih dahulu. Dengan demikian kejadian serupa diharapkan tak terulang.

Sementara itu, Pemkot Yogyakarta akan mengusut tuntas kasus yang telah viral tersebut karena mencoreng

citra wisata di Yogyakarta. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, pihaknya tengah mendalami informasi dari kepolisian, soal adanya permintaan dari kru bus, atau pimpinan rombongan, kepada juru parkir untuk mark up tarif parkir yang tertera di kuitansi supaya ditingkatkan jadi Rp350 ribu.

"Ini masih kita dalam, apakah informasi itu benar. Karena, kalau kita menilik dari kasus-kasus sebelumnya, itu kan ada kru bus, atau pemimpin rombongan yang meminta kuitansi dengan angka yang lebih besar ke jukirnya. Motifnya, ya, jelas, dia golek bathi," ungkap Heroe, Kamis (20/1).

Oleh sebab itu, pihaknya lantas bertanya-tanya, jika benar pihak operator transportasi yang meminta harga atau tarif parkir ditingkatkan, mengapa foto kuitansi itu, kemudian disebarluaskan di media sosial. Otomatis, ia mencurigai adanya motif kesengajaan dalam kejadian tersebut.

"Kalau dianalisa, foto kuitansi itu kan untuk me-

legitimasi, bahwa kejadian nuthuk benar-benar ada. Lalu, bisa juga ya, mungkin ada niat jahat dan menjelek-jelekkan Kota Jogja. Kami sudah berkoordinasi dengan teman Dishub, serta Kepolisian, supaya ini ditindaklanjuti," ucap Wawali.

Bahkan, orang nomor dua di kota pelajar itu tak menutup kemungkinan, untuk membawa kasus ini sampai ke ranah hukum.

Di samping itu, Heroe menyampikan, karena lokasi yang disinggahi bus tersebut bukan tempat khusus parkir (TKP) resmi dan tak mengantongi izin, maka besar kemungkinan rombongan tidak menaati aturan one gate system yang mewajibkan proses skrining di Terminal Giwangan.

"Jadi, mereka melanggar aturan perjalanan di masa PPKM juga. Kalau dia terskrining di Giwangan, begitu keluar, pasti diarahkan ke TKP resmi. Nah, kalau TKP resmi kan nggak mungkin tarifnya nuthuk seperti itu," ungkapnya. **(tro/aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 April 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005